

ABSTRAK

Kota Samarinda merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Timur yang banyak sekali mengeluarkan KP/IUP, salah satu wilayah yang banyak sekali aktifitas kegiatan penambangan batubaranya yaitu Kecamatan Samarinda Utara, hingga kini IUP yang ada di Kecamatan Samarinda Utara berjumlah 31 IUP, terdiri dari 28 IUP yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Samarinda dan 3 IUP oleh Pemerintah Pusat dalam batuk PKP2B. Dengan adanya kegiatan pertambangan batubara selain memberi dampak positif juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan biofisik dan sosial. Salah satu dampak negatif terhadap lingkungan biofisik yang terjadi di Kecamatan Samarinda Utara yaitu banjir yang menggenangi permukiman dan juga lahan-lahan pertanian di sekitar aktifitas pertambangan batubara, hingga kini hal tersebut terus terjadi bila hujan. Bila dampak negatif ini tidak dikelola dengan baik sesuai dengan dokumen lingkungan maupun peraturan yang sudah mengaturnya, maka dampak negatif ini akan terus terjadi, bila dibiarkan kemungkinan luasannya akan bertambah. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah aktifitas pertambangan batubara yang beroperasi sudah melakukan pengelolaan lingkungan. Untuk mengetahui hal tersebut penting tentunya diteliti melalui penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Yang menjadi objek penelitian sebanyak 4 (empat) IUP yang berada di Kecamatan Samarinda Utara. Pengambilan sampel menggunakan teknik sampling purposive yakni melalui 6 orang informan kunci untuk mendapatkan informasi mengenai pengelolaan lingkungan pada pertambangan batubara dan aktifitas di 4 (empat) objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan lingkungan di 4 objek penelitian masih tidak efektif, hal ini diketahui dari upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan masih belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang terkait. Pengelolaan lingkungan yang tidak efektif ini juga dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu pertama, penegakan hukum dalam hal lemahnya pemberian sanksi hukum terhadap pelanggaran. Kedua, lemahnya komitmen para pengusaha atau pemilik IUP dalam melakukan pengelolaan lingkungan. Dan ketiga, kurangnya peran pemerintah dalam hal pembinaan dan pengawasan.

Kata kunci :

Pengelolaan lingkungan, Pertambangan batubara, Samarinda Utara